

PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN DALAM MENJAWAB AKAR TERORISME DI INDONESIA STUDI PADA PENDEKATAN REEDUKASI ANAK PELAKU TERORISME

Prakoso Permono

Universitas Indonesia

Surat elektronik: prakoso.putra@ui.ac.id

Abstrak

Indonesia menghadapi tantangan esktrémisme kekerasan sebagai salah satu pendorong aksi terorisme. Untuk mencegah berkembangnya terorisme di Indonesia pemerintah berkomitmen untuk menjawab tantangan salah satunya dengan memulai pencegahan dari pemahaman ekstrem. Seluruh komponen bangsa termasuk juga Gerakan Pramuka melalui pendidikan kepramukaan sudah sepatutnya turut ambil bagian dalam usaha tersebut. Naskah ini berusaha menjawab potensi pendidikan kepramukaan sebagai salah satu jawaban terhadap tumbuh kembang akar terorisme di Indonesia dengan studi kasus pada pendekatan reedukasi pada anak pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia. Pendidikan bagi anak narapidana terorisme patut menjadi perhatian sebagai langkah preventif tumbuh kembangnya bibit-bibit terorisme masa depan. Dalam penelitian yang didasari oleh kajian pendahulu tentang akar terorisme di Indonesia ini disimpulkan bahwa Gerakan Pramuka melalui pendidikan kepramukaan memiliki potensi-potensi yang secara langsung berkorelasi dengan akar terorisme di Indonesia, sehingga dapat menjadi jawaban bagi usaha segenap komponen bangsa melawan esktrémisme kekerasan.

Kata Kunci: Kepramukaan, Gerakan Pramuka, akar terorisme, anak narapidana terorisme

PENDAHULUAN

Penting untuk menjaga anak narapidana terorisme selain sebagai bentuk implementasi amanat Undang-undang No. 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme namun juga sebagai usaha mencegah lahirnya bibit-bibit terorisme masa depan. Posisi anak narapidana atau pelaku tindak pidana terorisme seperti dilansir JawaPos (2018) saat penangkapan terduga teroris di Surabaya mengutip Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang menegaskan bahwa anak-anak narapidana terorisme ataupun anak terduga pelaku teror yang telah meninggal terlebih dahulu baik dalam proses penangkapan atau dalam proses menjalankan aksi teror merupakan korban, perspektif ini menjadi dasar mengapa penting mengangkat studi tentang reedukasi anak narapidana terorisme. Paling tidak terdapat beberapa jalur radikalisasi yang perlu dijadikan perhatian ketika membahas tentang anak narapidana terorisme. Anak berpotensi secara lebih besar terpapar radikalisme melalui (1) ajaran yang diajarkan oleh kedua orang tuanya, (2) perasaan bangga yang ditamamkan oleh orang tua sehingga anak menganggap aksi teror orang tua sebagai suatu panutan, dan (3) kemarahan atas ketidakadilan yang berdampak pada keluarganya baik dalam bentuk orang tua yang terbunuh, dipenjara, dikucilkan dari masyarakat, hingga perlakuan-perlakuan yang menurut persepsi seorang anak merupakan suatu kezaliman. Ketiga contoh kasus potensi radikalisasi pada anak ini baik secara teoretis konseptual maupun secara praktis terjadi di dunia dan juga Indonesia. Dalam studi kasus yang diangkat dalam penelitian ini ketiga jalur radikalisasi terjadi pada anak-anak narapidana terorisme di Pesantren Al-Hidayah, selain mengalami diskriminasi dan alienasi karena penolakan lingkungan, keluarga dan anak juga mengalami masalah ekonomi setelah penangkapan orang tuanya (Harahap & Irmayani, 2018).

Tantangan perkembangan radikalisme atau esktrémisme kekerasan ini juga sejatinya terbuka bagi seluruh generasi muda Indonesia. Data yang dirilis oleh *The Wahid Foundation* tahun 2016 melaporkan bahwa 46% kaum muda mendukung aksi intoleransi agama dalam praktik yang lebih menjurus pada legitimasi penggunaan kekerasan, studi tersebut dilakukan pada pelajar di area Jabodetabek (Qodir, 2016). Adapun potensi perkembangan sikap esktrémisme dan legitimasi kekerasan (*violent extremism*) ini dikuatkan oleh rilis terbaru PPIM UIN Jakarta yang menyebutkan bahwa sebesar 37,77% guru dari tingkat TK/RA sampai dengan SMA/ sederajat di Indonesia

memiliki pemahaman yang menjurus pada ekstremisme yang diwarnai dengan sikap-sikap intoleransi dengan 27,59% di antaranya berpandangan bahwa menggunakan kekerasan untuk mendukung terbentuknya suatu negara berdasarkan keyakinan keagamaan tertentu adalah suatu hal yang dapat dibenarkan (PPIM UIN Jakarta, 2018). Data-data yang begitu mengkhawatirkan tersebut dilegitimasi dengan suatu data empiris yang menunjukkan rekrutmen kelompok ekstremis-teroris seperti Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Jamaah Ansarut Tauhid (JAT), dan Jamaah Ansarut Syariah (JAS) bermula dari ajakan dan jaringan yang diperkenalkan oleh oknum guru (Falah, 2019). Oleh sebab itu selain berfokus pada ekstremisme kekerasan yang berpotensi berkembang pada anak narapidana terorisme, pendidikan kepramukaan juga mesti ambil bagian lebih luas pada perkembangan ekstremisme kekerasan di kalangan pelajar dan generasi muda Indonesia pada umumnya.

Berangkat dari dua konteks penyebaran radikalisme baik pada anak narapidana terorisme atau generasi muda Indonesia pada umumnya maka pendekatan untuk mengatasi persoalan ini tidak melulu mesti menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Betul bahwa terjadi proses radikalisasi di dunia maya dalam konteks masyarakat digital 4.0 di Indonesia, medium internet juga digunakan oleh kelompok ekstremis dan teroris untuk merekrut anggotanya (Golose, 2015). Namun demikian dalam konteks kemajuan teknologi tersebut tidak dapat dinafikan bahwa sebagai aktor rasional kelompok dan jaringan teroris di manapun berada akan selalu dinamis dan menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi sekitarnya. Maka opsi tradisional kerap kali justru menjadi ancaman yang nyata saat seluruh dunia berfokus pada perkembangan masyarakat 4.0 yang diwarnai kemajuan teknologi dan digitalisasi, terbukti dari aksi-aksi terorisme yang sangat tradisional dan sederhana seperti penusukan atau penembakan. Konteks kemajuan zaman tidak boleh melengahkan seluruh komponen bangsa pada ancaman-ancaman tradisional yang tetap ada, salah satunya ialah ancaman proses radikalisasi secara langsung.

Existing Konsep Reeducasi Anak Narapidana Terorisme

Salah satu upaya untuk mengatasi persoalan tersebut di Indonesia telah ada beberapa konsep reeducasi dalam kerangka deradikalisasi anak-anak narapidana terorisme. Salah satu contohnya ialah Pondok Pesantren Al Hidayah di Sumatera Utara, Rumah Aman di Jakarta, dan sekolah yang dirahasiakan di Jawa Timur. Dalam tiga lembaga pendidikan yang mengkhususkan diri bagi anak-anak narapidana terorisme ini bila dikompilasi terdapat tiga pendekatan utama untuk menghindarkan anak-anak narapidana terorisme untuk terlibat dalam terorisme dikemudian hari. Di antara pendekatan yang digunakan ialah (1) melalui pendidikan agama yang mengajarkan doktrin agama yang penuh kedamaian, (2) membangun kepercayaan antar anak dan guru serta mengenalkan toleransi dan kecintaan pada kehidupan di Indonesia yang majemuk, dan (3) membangun kepercayaan dan mengenalkan Pancasila melalui sejarah dan sejarah para pahlawan dengan target akhir anak siap hidup bertoleransi. Penerapan ketiga pendekatan ini menggunakan pendekatan kajian agama di pondok pesantren, merahasiakan identitas dan latar belakang anak di sekolah yang dirahasiakan, dan usaha mencari keluarga untuk mengadopsi anak narapidana terorisme untuk memutus jaringan kelompok teror (Arintya, 2018; Lipson, 2018; DW, 2019).

Dari konsep yang telah ada ini apakah cukup sebagai suatu usaha reeducasi anak narapidana terorisme secara sempurna? Penelitian ini akan mencoba untuk menjawab pertanyaan tersebut untuk akhirnya berusaha memberikan analisis konseptual terhadap potensi yang ada dalam pendidikan kepramukaan dalam menjawab persoalan reeducasi anak narapidana terorisme melalui pendekatan akar-akar terorisme di Indonesia. Oleh sebab itu penulis merumuskan pertanyaan penelitian yaitu bagaimana pendidikan kepramukaan dapat menjadi media komplementer dalam usaha reeducasi anak narapidana terorisme berdasarkan sebab dan akar terorisme di Indonesia?

PEMBAHASAN

Memulai pembahasan program reeducasi dan persiapan reintegrasi anak narapidana terorisme terlebih dahulu kita perlu mengkritik metode dan pendekatan yang telah ada sebelumnya. Sedangkan dalam ruang lingkup yang lebih spesifik pada studi kasus yang diangkat dalam makalah

ini maka penulis akan mengukur keunggulan dan kelemahan dalam bentuk bagan terhadap metode dan pendekatan yang digunakan di Indonesia dengan perbandingan riset-riset terdahulu tentang akar terorisme di Indonesia.

Tabel 1 Analisis akar terorisme dan *existing* pendekatan reedukasi

AKAR TERORISME	PENDEKATAN	KESESUAIAN	KETERANGAN
Ideologi: Bentuk negara Islam.		V	Pemahaman agama diselesaikan melalui pendidikan agama yang intensif.
Ideologi: Jihad; pemahaman sempit.	1. Melalui pendidikan agama yang mengajarkan doktrin agama yang penuh kedamaian,	V	Pemahaman agama Diselesaikan melalui pendidikan agama yang intensif.
Psikologis mikro: <i>Self-esteem</i> ; pencapaian diri; merasa penting dan berharga.	2. Membangun kepercayaan antar anak dan guru serta mengenalkan toleransi dan kecintaan pada kehidupan di Indonesia yang majemuk, dan	X	Pendidikan agama, membangun pemahaman toleransi, sekali terhadap masalah psikologis mikro.
Psikologis meso: Pola asuh; institusi keluarga.	3. Membangun kepercayaan dan mengenalkan Pancasila melalui sejarah dan sejarah para pahlawan dengan target akhir anak siap hidup bertoleransi.	V	Ada keteladanan atau sosok guru dan pengasuh pondok Khairul Gazali
Psikologis makro: Persepsi/fakta ketidakadilan; penerimaan masyarakat		X	Seluruh pendekatan tidak berhubungan sama sekali dengan tantangan reintegrasi anak kemudian hari.

Selain uraian tabel di atas, kesesuaian yang ada antara masalah dan pendekatan masih dapat dikaji lebih dalam. Sebagaimana dijelaskan dalam kerangka teoretis bahwa persoalan terorisme dan radikalisme di Indonesia harus diselesaikan berdasarkan dua masalah utama psikologis dan ideologi dalam aspeknya yang mikro, meso, dan makro. Maka penggunaan pendekatan keagamaan, sejarah, kenyataan keberagaman dan perlunya toleransi, atau pendidikan sejarah sejatinya pendekatan tersebut tidak secara langsung menyelesaikan permasalahan awal berupa kebutuhan dasar akan pengakuan dan aktualisasi diri sebagaimana digambarkan dalam tabel di atas. Melainkan kurang lebih menyelesaikan persoalan terorisme dan radikalisme hanya dalam konteks ideologi. Pendekatan yang sifatnya dogmatis seakan hanya memindahkan anak narapidana terorisme dari doktrin kekerasan ke doktrin lainnya, dengan metode yang sama. Kondisi ini yang digambarkan oleh Tareq Ali (dalam Azra dkk., 2018, 25-30) sebagai clash of fundamentalism dan terbukanya potensi kristalisasi nilai yang secara logis menghambat efektivitas reedukasi dengan metode konvensional di atas. Demikian pula dengan metode merahasiakan identitas anak dan tidak mengintegrasikan anak dalam pergaulan yang lebih luas menyisakan pertanyaan tersendiri tentang pengajaran nilai toleransi tanpa pernah merasakan kondisi sosial dan keberagaman Indonesia secara langsung. Oleh sebab itu penulis berusaha merumuskan naskah ini sebagai penawaran opsi pendekatan dan metode dalam reedukasi anak narapidana terorisme di Indonesia.

Reedukasi melalui Metode Kepramukaan

Salah satu tahap awal dari penggunaan pendidikan kepramukaan sebagai medium komplementer pada reedukasi anak narapidana terorisme dapat dijalankan pendidikan kepramukaan secara segmental pada aplikasi metode kepramukaan saja. Pendidikan kepramukaan

diselenggarakan secara metodik dengan menggunakan 8 (delapan) metode. Mulai dari hal yang paling prinsip dalam kepramukaan yaitu 1) "pengamalan kode kehormatan Pramuka" yang berisi Tri Satya (tiga janji) yang prinsipnya adalah janji untuk menjalankan kewajiban pada Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, menolong sesama, dan ikut serta/mempersiapkan diri membangun masyarakat yang memiliki turunan Dasa Darma (10 Darma) yang merupakan kode moral yang harus dimiliki setiap Pramuka. 2) "belajar sambil melakukan" (*learning by doing*) bersifat praktikal dan berbasis pengalaman langsung, 3) "kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi" sebagai wadah aktualisasi diri dan praktik hidup dalam kelompok yang pasti memiliki berbagai perbedaan dan dinamika, 4) "kegiatan yang menarik dan menantang", 5) "kegiatan di alam terbuka" poin 4&5 membuat pendidikan kepramukaan lebih *appealing*/menarik sebagai pendidikan non-formal, 6) "kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan" sebagai implementasi *Patrap Triloka* Ki Hajar Dewantara, 7) "penghargaan berupa tanda kecakapan" sebagai bentuk diberikannya apresiasi yang dapat menguatkan harga diri (*self-esteem*) dalam tangga kebutuhan Maslow, dan 8) "satuan terpisah antara putra dan putri" (Suyatno, 2016; Gerakan Pramuka, 2018).

Dalam penerapan seluruh komponen metode kepramukaan dilakukan tidak secara individual. Konsep ini dikenal dengan istilah sistem beregu, setiap barung untuk Siaga (7-10 tahun)/regu untuk Penggalang (11-15 tahun)/sangga bagi Penegak (16-20 tahun) dibagi berdasarkan beberapa orang peserta didik mulai dari enam sampai dengan maksimal delapan orang. Sistem beregu ini dibuat dengan tujuan agar peserta didik memahami pentingnya kerja sama, pembagian kerja, dan toleransi antar ego di dalam kelompok. Setiap regu dipimpin oleh seorang pemimpin regu dan wakilnya yang dipilih melalui musyawarah anggota regu masing-masing. Kondisi beregu ini ideal diterapkan dalam konteks belajar menahan egoisme diri karena berpotensi untuk bertemu dengan teman seregu dengan perbedaan latar belakang dan perbedaan cara pikir. Peserta didik diajak untuk menerima kenyataan dan keniscayaan bahwa bekerja sama dengan perbedaan yang ada adalah satu-satunya jalan untuk dapat mencapai suatu tujuan.

Selain itu dalam sistem kepramukaan juga terdapat sistem tanda penghargaan. Mirip dengan sistem tanda kecakapan namun perbedaan antara keduanya ialah sistem tanda penghargaan bukan merupakan skema yang ditempuh dan secara khusus dikerjakan dalam pendidikan kepramukaan melainkan penilaian dari otoritas terkait pada jasa ataupun perbuatan individu selama menjadi anggota Gerakan Pramuka. Dalam sistem ini terdapat banyak jenis tanda penghargaan dari tingkat terendah yang dapat diserahkan oleh pembina Pramuka di pangkalan baik institusi formal ataupun institusi non-formal sampai dengan tingkat tinggi yang dapat diserahkan mulai dari bupati/walikota, gubernur, bahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Atau juga penghargaan sederhana yang diberikan oleh pembina masing-masing dapat melahirkan rasa afeksi dari komunitas dan orang-orang sekitar. Sistem ini dalam menyelesaikan dan menyediakan kebutuhan dasar menurut Maslow (dalam Sarwono, 2010) yaitu pengakuan dan penghargaan dari orang lain dapat menjadi instrumen yang efektif bagi pemulihan *self-esteem* pada anak-anak narapidana terorisme.

Sebagai catatan bahwa implementasi metode kepramukaan tidak berarti seluruh peserta harus menjadi anggota Gerakan Pramuka. Artinya peserta tidak perlu berseragam dan menggunakan identitas organisasi Gerakan Pramuka, sebab identitas dan atribut yang dikenakan oleh Pramuka diatur hanya dapat digunakan anggota Gerakan Pramuka yang disyaratkan telah melalui proses pelantikan dan membaca janji Tri Satya. Selain itu keanggotaan Gerakan Pramuka juga bersifat sukarela tanpa paksaan (Gerakan Pramuka, 2018). Sehingga kegiatan pada tahap permulaan ini ialah murni penerapan metode kepramukaan sebagai suatu metode pendidikan, adapun konten kepramukaan yang lebih dalam akan dilaksanakan pada tahap penyempurnaan ketika sudah bergabung dan menjadi anggota Gerakan Pramuka.

Bila anak narapidana terorisme sebagai objek reedukasi dalam kerangka deradikalisasi telah menerima kegiatan-kegiatan intervensi yang didasari oleh tahapan permulaan metode kepramukaan maka baru dapat dilanjutkan pada tahapan berikutnya. Tahap berikutnya ialah menjadi anggota Gerakan Pramuka dan kemudian dapat mengikuti kegiatan kepramukaan di tingkat-tingkat berikutnya. Ketika masuk dalam skema pendidikan kepramukaan maka peserta akan melalui jenjang-jenjang yang dapat ditempuh peserta didik. Jenjang-jenjang tersebut merupakan

jenjang kecakapan yang diukur dalam standardisasi nasional berupa syarat kecakapan umum, syarat kecakapan khusus, dan syarat kecakapan pramuka garuda. Selain sebagai alat motivasi bagi peserta didik untuk meningkatkan kecakapannya, terdapat makna yang lebih filosofis dalam penempuhan tingkat kecakapan. Misalnya tanda kecakapan Pramuka Garuda hanya dapat dicapai dengan kecakapan kepramukaan yang baik, *life skill*, pencapaian akademik yang baik, serta dapat dijadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Pencapaian Pramuka Garuda merupakan pencapaian tertinggi dan penghargaannya dianugerahkan paling rendah oleh walikota/bupati pada upacara-upacara hari besar. Setelah menyelesaikan syarat Pramuka Garuda peserta didik juga dapat bergabung dalam *Association of Top Achiever Scouts* yaitu asosiasi dunia yang menghimpun para Pramuka dengan pencapaian tertinggi di tiap negara. Kecakapan seorang Pramuka dapat terlibat jelas pada seragam yang dikenakannya. Dalam konteks sosiologis konsep ini disebut sebagai *achieved status* atau menurut Linton yaitu status sosial yang digapai berdasar prestasi, secara sosiologis individu yang tidak memiliki *ascribed status* yang melekat sejak lahir akan terdorong mengejar *achieved status* (Sunarto, 1993, 111-115) dan kepramukaan menyediakan saluran positif tersebut.

Instrumen Pencapaian dan *Learning by Doing*

Salah satu metode yang juga mendasar ditawarkan pendidikan kepramukaan adalah metode *learning by doing*. Kita kerap kali mendengar agar segala sesuatu yang dilakukan jangan terbatas hanya pada teori atau wacana saja, segala bentuk wacana mesti dipraktikkan untuk menunjukkan suatu ukuran keberhasilan. Demikian pula dalam pendidikan, *outcome* atau luaran pendidikan hanya dapat dirasakan atau dilihat setelah individu menyelesaikan pendidikan. Pada saat itulah pendidikan yang diterima oleh orang diuji keberhasilannya, sedangkan pada masa pendidikan kerap kali hanya dibatasi pada transfer atau sekedar perpindahan pengetahuan dari pengajar ke yang diajar. Alangkah lebih baik bila sejak masa pendidikan seseorang sudah dapat sedikit banyak menguji kemanfaatan pelajaran dan pendidikan yang sudah diterima. Karenanya metode belajar *learning by doing* menjadi penting dalam usaha reedukasi anak narapidana terorisme.

Metode pembelajaran *learning by doing* atau dalam bahasa Indonesia disebut belajar sambil melakukan merupakan salah satu metode dengan hasil belajar paling optimal. Menurut Prof. Dr. Suyatno (2016) pembelajaran langsung tanpa proses ceramah, tanpa penggunaan prototipe, dan tanpa simulasi terlebih dahulu atau secara sederhana dilakukan sebagai suatu proses natural tanpa mengada-ada akan mencapai hasil akhir pendidikan paling tinggi. Pembelajaran dengan melakukan juga menyisakan pengalaman yang akan diingat karena benar-benar dilakukan secara langsung. Contohnya ialah ketika seseorang dihadapkan pada persoalan yang sama dan pernah dilakukan sebelumnya melalui proses belajar metode ini maka orang akan semakin mudah untuk mengingat apa yang telah dipelajari.

Sejatinya pendekatan *learning by doing* ini juga bukanlah merupakan metode yang baru dalam dunia pendidikan, hanya saja memang jarang diterapkan dalam kerangka pendidikan formal dengan berbagai alasan dan kekurangan yang ada. Secara filosofis filsuf Aristoteles pada 300 tahun sebelum Masehi telah menyebutkan bahwa "kita harus belajar dengan melakukan. Anda pikir Anda tahu itu, Anda tidak memiliki kepastian sebelum Anda benar mencobanya", kemudian metode ini dikembangkan kembali pada tahun 1700an oleh Jean-Jacques Rousseau di Prancis saat struktur pendidikan di Prancis dan seluruh dunia pada masanya ditandai dengan pendidikan klasik menghafal. Ia menyebutkan bahwa peranan pendidik ialah untuk menyajikan suatu masalah dan persoalan yang nyata dan membangkitkan rasa ingin tahu, dari permasalahan sederhana yang didesain oleh pendidikan maka peserta didik tidak sekedar menjadi objek transfer pengetahuan. Selanjutnya John Dewey berpendapat soal *learning by doing* dengan adagium sederhana yaitu "pendidikan bukanlah persiapan untuk hidup, pendidikan itu adalah kehidupan itu sendiri" (Suyatno, 2016). Maka dari itu pengembangan individu dengan metode ini juga menempatkan pengalaman, latar belakang, pengetahuan, dan karakter tiap individu yang unik dalam proses belajar yang logis dan dapat diterima akal ketimbang teori dan konsep yang tidak logis atau terlalu mengawang. Sehingga sikap dan hasilnya juga akan berbeda satu dengan yang lainnya, namun tepat pada sasaran dan kesesuaian tiap individu yang unik.

Adapun metode ini bukanlah sekedar metode anak harus mempraktikkan segalanya. Karena hal semacam itu sangatlah sederhana dan cenderung tidak akan mencapai sasaran pendidikan apa-apa, misalnya tentu sulit bagi anak narapidana terorisme yang mulanya hidup di

rumah dalam aturan nilai fundamental tertentu seperti pembatasan pergaulan dengan orang lain untuk langsung diminta hidup di lingkungan yang sepenuhnya terbuka dan berbeda. Maka metode *learning by doing* ini haruslah diikuti dengan sebuah struktur yang ajeg dan ditaati. Langkah penerapan metode belajar sambil melakukan ialah tahapan (1) *experience* (melakukan), (2) *sharing* (berbagi), (3) *process* (menjalani proses), (4) *generalize* (mengaitkan dengan kenyataan), dan (5) *apply* (mengaplikasikan dalam situasi yang nyata). Siklus ini dijalankan dengan urutan melakukan suatu kegiatan, mengamati proses dalam kegiatan, merefleksikan hasil kegiatan, dan mengaplikasikan hasil pembelajaran secara konkret (Suyatno, 2016). Salah satu kunci utama dalam metode ini ialah melakukan dan merefleksikan hasil.

Bila kita bertolak pada kasus Pondok Pesantren Al Hidayah yang menampung anak narapidana terorisme diterapkan metode *learning by doing*. Para santri diberikan pengarahan bahwa hari ini akan diadakan program kunjungan ke sekolah negeri di luar kecamatan, kemudian para santri diberangkatkan menuju ke sekolah negeri tersebut dan melakukan aktivitas yang telah diprogramkan seperti belajar bersama satu mata pelajaran, beristirahat pada jam istirahat sekolah tersebut dengan membeli makanan di kantin, dan ditutup dengan melakukan kegiatan permainan gabungan dan ramah-tamah. Setelah kembali ke pondok pesantren para santri dapat dikumpulkan dan diminta menceritakan apa yang dilihat, dirasa, didapat dari kunjungan tersebut. Setelah semua secara individual memberikan perspektif personalnya fasilitator akan membulatkan pembelajaran dengan refleksi. Misalnya bahwa di dunia itu orang berbeda-beda, ada kawan yang tidak berkerudung namun juga pribadi yang baik, atau juga misalnya bahwa orang-orang berteman satu sama lain dan dapat bergembira bersama, di antaranya ada yang ramah dan baik hati. Metode semacam ini dengan contoh di atas adalah satu-satunya *best practice* dan metode pembelajaran internalisasi nilai yang menyentuh individu. Konsep ini juga disebut sebagai konsep *conditioning*.

Di dalam Gerakan Pramuka juga terdapat berbagai agenda pertemuan. Sifatnya yang universal bahkan membuat Gerakan Pramuka yang juga anggota *World Organization of the Scout Movement* yang beranggotakan organisasi kepanduan dari hampir seluruh negara di dunia memiliki dimensi pertemuan internasional bahkan dunia. Agenda pertemuan dalam Gerakan Pramuka memungkinkan setiap Pramuka tidak hanya aktif dan berkegiatan bersama dengan pasukannya di pangkalan namun juga pada berbagai jenjang mulai dari ranting/kecamatan, cabang/kota, daerah/provinsi, nasional, regional/Asia-Pacific Region, dan tingkat dunia. Tentunya pertemuan-pertemuan tersebut dikemas dalam berbagai bentuk mulai dari pelatihan, konferensi, sampai dengan pesta atau yang sering disebut sebagai *jamboree*. Sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia peserta jambore ialah Pramuka dengan usia 11 – 15 tahun, dan Pramuka dengan usia 16 – 25 tahun dapat mengikuti raimuna atau padanan internasionalnya disebut sebagai *rovermoot*.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam jambore atau raimuna juga beraneka ragam. Di antara kegiatan umum yang pasti ada ialah kegiatan persaudaraan dan permainan-permainan menarik dan menantang di alam terbuka seperti panjat tebing, mendayung, kedirgantaraan, kegiatan teknologi, dan kegiatan persaudaraan seperti malam kebudayaan, festival dari tiap daerah, dan aktivitas wisata (World Scout Bureau, 2010). Umumnya kegiatan jambore dan raimuna berlangsung sepanjang satu pekan penuh dan dihadiri seluruh perwakilan provinsi di seluruh Indonesia, misalnya Jambore Nasional tahun 2016 yang dihadiri 30.000 orang Pramuka dan Raimuna Nasional 2017 yang menghimpun Pramuka dari seluruh provinsi, perwakilan diplomatik RI di luar negeri, dan organisasi kepanduan luar negeri sebanyak 15.000 orang. Kegiatan ini dilaksanakan mulai dari tingkat terendah di kecamatan sampai dengan tingkat nasional bahkan dunia. Dalam kegiatan jambore inklusivitas adalah salah satu nilai yang diterapkan dan dapat langsung dirasakan misalnya tiap kontingen dapat tinggal bersebelahan dengan kontingen dari daerah yang berbeda warna kulit, budaya, bahasa, bahkan agama. Kegiatan keagamaan juga dijalankan secara rutin di bumi perkemahan yang sama dan posisinya bersebelahan antar masjid, pura, wihara, gereja Kristen, dan kapel Katolik yang seluruhnya aktif beroperasi saat kegiatan jambore berlangsung. Termasuk juga pelibatan kontingen khusus Pramuka berkebutuhan khusus yaitu Pramuka yang memiliki kekurangan tuna wicara, tuna rungu, tuna netra, dan sebagainya. Dalam kondisi hidup bersama berdampingan antar agama, budaya, bahasa, dan kebiasaan serta penuh dengan rasa persaudaraan dan persahabatan sebagai sesama Pramuka maka anak-anak narapidana terorisme yang ikut dalam program kepramukaan akan menjadi bagian integral tanpa pertanyaan identitas serta dapat

merasakan Indonesia secara langsung dan bukan sekedar melalui teori. Unsur praktis ini yang menjadikan pendidikan kepramukaan lengkap sebagai suatu alat dalam menjawab perkembangan akar terorisme bagi anak narapidana terorisme.

Instrumen Dinamika Kelompok dan Dialog

Metode yang menjadi tawaran berikutnya dari pendidikan kepramukaan masih juga berhubungan dengan metode *learning by doing*. Atau justru secara metodologis metode ini ialah salah satu bagian dari metode *learning by doing* yang dapat memperkuat metode tersebut. Dalam metode *learning by doing* dapat dilihat bahwa anak narapidana terorisme atau peserta didik yang semula merupakan objek transfer ilmu pengetahuan diposisikan sebagai subjek dalam pendidikan, yaitu dengan cara pelibatan secara langsung anak dalam berbagai kegiatan. Salah satu metode pelengkap yang dapat digunakan ialah metode dialog atau *focus group discussion* yang juga disebut diskusi terpumpun. Metode ini dianggap cukup efektif dalam penyelenggaraan berbagai program *counter violent extremism*.

Dalam penerapan metode kepramukaan untuk menangkal ekstremisme kekerasan, deradikalisasi sepatutnya tidak dianggap sebagai tujuan akhir. Sepatutnya deradikalisasi dipandang sebagai sebuah proses natural dalam metode dialog. Tujuan akhir dari metode dialog tidak sekedar membawa individu yang terpapar radikalisme mengubah pola pikirnya namun juga sikapnya, sehingga target akhir dari metode ini ialah menciptakan rasa saling menghormati, saling memahami perbedaan, kohesi sosial, dan menjadi warga negara yang aktif dalam mempromosikan nilai-nilai dialog. Pada prinsipnya yang disebut sebagai metode dialog ialah sebuah kerangka nilai yang mesti dipegang untuk memastikan metode ini dapat berjalan. Pendekatan dialog memiliki beberapa karakteristik, di antaranya:

Bersifat autentik, maknanya menerima secara autentik latar belakang pemikiran peserta dialog. Contohnya ialah anak narapidana terorisme berlatar belakang agama Islam, kebenaran Islam adalah autentisitas anak narapidana terorisme tersebut. Dialog tidak ada dimulai dengan konfrontasi nilai dan nilai Islam dapat dijadikan penguat dialog saat sudah terbangun rasa saling percaya.

Positif dan proaktif, maknanya ialah dijalankan secara menyenangkan, tenang, dan melibatkan seluruh pihak dalam dialog. Metode ini tidak diterapkan dengan pemaksaan nilai atau pencekakan doktrin, seluruh pihak yang menjadi peserta dialog juga diberikan kesempatan yang sama dan tidak mendominasi.

Independen, maknanya ialah terlepas dari segala bentuk kepentingan. Artinya tujuan akhir dialog tidak dirancang sejak awal nilai-nilai tertentu yang dipaksakan. Dalam kasus terorisme misalnya perspektif pemerintah (baca: kekuasaan) dalam menyikapi anak/pelaku teror pada *status quo* kekuasaan tentu akan berbeda dari pihak yang tidak memiliki kepentingan sepihak.

Altruistis, maknanya ialah dialog harus dijalankan oleh para sukarelawan dan profesional dalam bidangnya, sehingga terdapat suatu semangat dalam dialog tersebut. Tentunya terlebih dahulu para sukarelawan dan profesional yang akan bergabung dalam dialog harus melalui suatu pelatihan pengantar (Dialogue Society, 2009). Maka tentu bila pendekatan ini dijalankan oleh seorang pembina Pramuka yang memiliki standarisasi pembina melalui Kursus Pembina Pramuka Mahir tingkat Dasar (KMD) ditambah dengan pemahaman akan isu-isu perdamaian maka tentu proses dialog yang umum dilakukan oleh para Pramuka setelah latihan sebagai bentuk refleksi akan berdampak besar bagi para peserta didik.

Adapun dalam konteks reedukasi anak narapidana terorisme di Indonesia metode ini merupakan kelanjutan metode sebelumnya. Anak setelah melakukan berbagai kegiatan *learning by doing* dapat ikut dalam suatu proses dialog yang tidak melulu harus diisi sukarelawan dan profesional yang umumnya merupakan orang dewasa melainkan juga teman-teman sebaya dalam diskusi yang menyenangkan terhadap suatu topik di bawah bimbingan ahlinya. Dalam menjalankan metode dialog secara teknis, berbagai hal perlu dijadikan perhatian dalam memfasilitasi dialog, untuk menjalankan dialog dengan baik seorang fasilitator selain harus aktif mengikuti berbagai dialog sebelumnya juga mesti menerima serangkaian pelatihan terlebih dahulu. Inilah tantangan bagi para pembina Pramuka secara umum di Indonesia.

Pendampingan Orang Dewasa

Untuk melengkapi dua metode yang menjadi fokus bahasan di atas maka kini kita perlu memperhatikan bahwa kedua metode tersebut adalah metode yang diterima anak narapidana terorisme semasa dalam institusi pendidikan. Pada akhirnya anak-anak tersebut juga akan kembali menjadi bagian dari kelompok sosialnya, entah keluarga atau masyarakat dan lingkungannya. Bekal-bekal yang diberikan metode sebelumnya diharapkan dapat menjadi pegangan dan dapat diaplikasikan pada situasi nyata sebagaimana dijelaskan pada metode pertama, namun demikian terdapat urgensi bagi kita untuk menyiapkan metode final untuk mencegah individu kembali pada pikiran atau sikapnya yang semula. Metode ini telah banyak dikembangkan dalam kerangka deradikalisasi di berbagai negara, salah satunya Denmark.

Pendekatan mirip dengan ini disebut sebagai Aarhus Model di Denmark. Program ini ditujukan untuk menghadapi perkembangan radikalisme bagi orang muda di Denmark, selain radikalisme juga usaha ini ditujukan untuk menjaga perkembangan diskriminasi dan menjaga kohesi sosial masyarakat Denmark. Program ini salah satunya menempatkan posisi pendampingan bagi setiap individu yang mengikuti program ini, pendampingnya tentu bukan mantan narapidana terorisme melainkan orang moderat dan dengan segala pertimbangan usia, kemampuan, pengetahuan, dan sikap bagi setiap individu. Sistem yang digunakan ialah *mentoring* dan juga pendekatan personal. Model Aarhus sekarang memiliki 10 orang mentor yang telah memiliki kualifikasi pendidikan dan juga identitas yang sesuai. Pertemuan dengan mentor juga bukan seperti yang dibayangkan dalam proses deradikalisasi dalam lembaga pemasyarakatan melainkan melalui pendekatan yang lebih informal (Bertelsen, 2015). Maka metode pendampingan ini amat sesuai dengan metode pendidikan kepramukaan berupa kemitraan dengan orang dewasa. Bahwa seluruh aktivitas kepramukaan sepatutnya dibawah oleh pengawasan orang dewasa yang telah terstandarisasi. Oleh sebab itu lagi-lagi posisi pembina Pramuka amatlah penting tidak hanya sebagai perencana dan eksekutor kegiatan namun juga sebagai mentor yang mengenal peserta didiknya secara individual sehingga dapat menjalankan proses mulai dari perencanaan hingga evaluasi berbasis individu.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dikemukakan di atas maka kepramukaan dapat dijadikan sebuah solusi bagi anak narapidana terorisme. Yang menjadi sasaran utama dari analisis potensi yang dapat digunakan melalui pendidikan kepramukaan adalah untuk digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar manusia berupa aktualisasi diri, penghargaan, pengakuan, afeksi lingkungan, dan belajar hidup dalam kelompok dan keberagaman. Ujung dari pencapaian tersebut adalah tingginya *self-esteem* atau harga diri yang membuat anak narapidana terorisme dapat menerima reedukasi secara lebih terbuka, termasuk juga edukasi melalui pendekatan *learning by doing* atau secara langsung belajar hidup bersama, bekerja sama, nilai kebangsaan, serta toleransi melalui kegiatan di alam terbuka yang dikemas secara menarik dan menantang. Ditambah juga peningkatan kualifikasi atau kecakapan umum dan kecakapan khusus yang diajarkan dalam pendidikan kepramukaan dengan sasaran akhir kecakapan, kebangsaan, dan karakter yang akan bermanfaat bagi pengembangan diri berbasis kompetensi. Oleh sebab itu pendidikan kepramukaan yang diajukan sebagai pendekatan komplementer dalam penelitian ini seyogianya dapat menjadi pendekatan yang baik bila diaplikasikan bagi anak narapidana terorisme untuk berkontribusi menyelesaikan persoalan-persoalan dasar dari akar menuju terorisme.

Secara faktual pendidikan kepramukaan juga telah diuji praktik dan penerapannya. Merujuk pada kerangka teoretis, analisis, serta observasi partisipatoris yang dilakukan oleh penulis dalam berbagai aktivitas kepramukaan secara rutin dari tingkatan gugus depan hingga tingkat internasional maka konsep-konsep seperti pemberian penghargaan untuk meningkatkan *self-esteem*, pendampingan orang dewasa sebagai mentor dan konselor, belajar sambil melakukan dan menjalani berbagai pengalaman hidup dalam keberagaman dan toleransi dalam berbagai kegiatan kepramukaan, hingga dialog dan refleksi yang mengandung nilai-nilai dengan didahului permainan yang menarik dan menyenangkan ada di dalam pendidikan kepramukaan dan sepenuhnya dapat diaplikasikan. Oleh sebab itu pendekatan pendidikan kepramukaan ini tidak hanya diharap dapat memberi manfaat bagi objek anak narapidana terorisme sebagaimana telah dibahas namun juga pada pelajar dan generasi muda Indonesia pada umumnya. Namun demikian amat disayangkan

bentuk keterlibatan Gerakan Pramuka dan pendidikan kepramukaan secara khusus dan langsung dalam isu ekstremisme kekerasan termasuk juga penyiapan sumber daya pembina masih amat sulit kita temukan, padahal posisi Gerakan Pramuka dengan jaringannya di seluruh Indonesia sebagai instrumen dan infrastruktur dalam menjawab tantangan ekstremisme kekerasan jelas dapat ambil bagian mendukung gerakan pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan lembaga negara terkait.

Rekomendasi riset awal ini ialah agar Kwartir Nasional Gerakan Pramuka mulai mempersiapkan perannya dalam usaha menjawab tantangan akar terorisme di Indonesia sebagai bentuk dukungan pada program pemerintah melawan ekstremisme kekerasan dan terorisme. Salah satu langkah awalnya ialah dengan memulai penyiapan sumber daya pembina dan kurikulum yang sesuai dengan melibatkan lembaga pemerintah terkait dan kalangan akademisi yang berfokus pada ekstremisme kekerasan dan terorisme di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, A. dkk. (2017). Reformulasi ajaran Islam: jihad, khilafah, dan terorisme. Mizan.
- Bertelsen, P. (2015). Danish preventive measures and de-radicalization strategies: The Aarhus model. *Panorama: Insights into Asian and European Affairs*, 1(241), 53.
- Golose, P. R. (2015). Invasi terorisme ke cyberspace. Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Harahap, H. I., & Irmayani, M. T. (2017, November). The Phenomenon of De-radicalization in Al Hidayah Boarding School, North Sumatra Province, Indonesia. In *Third International Conference on Social and Political Sciences (ICSPPS 2017)*. Atlantis Press.
- Crenshaw, M. (1981). The causes of terrorism. *Comparative politics*, 13(4), 379-399.
- Falah, Haris Amir. (2019). Hijrah dari Radikal kepada Moderat: Episode Perjalanan Mantan Radikalis. Penerbit Milenia.
- Qodir, Z. Kaum Muda, Intoleransi, dan Radikalisme Agama. *Jurnal Studi Pemuda*, 5(1), 429-445.
- Sarwono, S. W. (2010). Pengantar psikologi umum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sarwono, S. W. (2013). Menakar jiwa mantan teroris melalui tes Davidido CHaD. Penerbit Salemba Humanika.
- Sunarto, K. (1993). Pengantar sosiologi. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Suyatno. (2016). Metode Kepramukaan Untuk Pembina dan Pelatih Pramuka. Mustika Ilmu.
- World Scout Bureau. (2010). Jambore: Apa, Siapa, Dimana, Kapan, Mengapa, Bagaimana?. Pustaka Tunas Media.
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka hasil Munas 2018 di Kendari.
- Arintya. (2018). Mengenal Pesantren Al Hidayah, Sekolah Khusus untuk Anak-anak Pelaku Terorisme Pertama di Indonesia. Hipwee.
- Dialogue Society. (2007). Deradicalisation by Default: The Dialogue Approach to Rooting out Violent Extremism.
- DW. (2019). Rumah Aman di Jakarta Jauhkan Anak Teroris dari Ideologi Radikal. Diakses di <https://www.dw.com/id/rumah-aman-di-jakarta-jauhkan-anak-teroris-dari-ideologi-radikal/a-49469121>
- JawaPos. (2018). Pesantren Al Hidayah, Tempat Deradikalisasi Anak-anak Teroris (Habis). Diakses di <https://www.jawapos.com/features/24/05/2018/pesantren-al-hidayah-tempat-deradikalisasi-anak-anak-teroris-habis/>

- Kajian Terorisme UI. (2019) Infografis: Akar Terorisme: Analisis terhadap 18 Mantan Narapidana Terorisme.
- Lipson, David. (2018). Inside Indonesia’s Secret School for Children of Terrorism. ABC News. Diakses di <https://www.abc.net.au/news/2018-07-29/inside-indonesias-secret-school-for-the-children-of-terrorism/10042534>
- PPIM UIN Jakarta. (2018). Pelita yang Meredup: Potret Keberagaman Guru Indonesia. Diakses di <https://conveyindonesia.com/survei-ppim-2018-menyibak-intoleransi-dan-radikalisme-guru/>